

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang tidak tercapai. Salah satu aktor yang berperan penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan yakni Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). PBB merupakan sebuah organisasi terbesar internasional yang beranggotakan 193 negara berdaulat. Dengan jumlah anggota tersebut PBB diharapkan dapat melaksanakan peran penting dalam menghasilkan kehidupan yang lebih baik dalam dimensi apa pun. Salah satu program utama PBB untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan yakni dengan adanya program yang *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini. Mega program ini diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 dan diproyeksikan sampai tahun 2030 (Rizki et al., 2021). SDGs dalam pencapaiannya mengutamakan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. Selain itu, cakupan dari SDGs lebih luas dibandingkan dengan MDGs yang di mana SDGs akan melanjutkan prioritas-prioritas pembangunan yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi (data.ntbprov.go.id, 2020). SDGs menjadi tolak ukur dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Program tersebut harus dilaksanakan secara merata baik oleh negara maju, maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 2021, peringkat dan poin Indonesia pada laporan *The Sustainable Development Report* sama dengan laporan pada tahun 2020 yakni menempati peringkat ke 97 dengan poin 66.3. Pelaksanaan SDGs pada laporan tersebut tidak terdapat tanda penurunan poin dari setiap indikator. Visualisasi dashboard SDGs 2021 sama dengan dashboard SDGs 2020, akan tetapi terdapat perbedaan dalam rincian dari masing-masing target indikator. Salah satu tujuan SDGs yang belum tercapai di Indonesia yakni tujuan yang pertama tanpa kemiskinan (*No poverty*)

([www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id)). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin tiap-tiap provinsi di Indonesia yang di mana berdasarkan data yang di peroleh dari [bps.go.id](http://bps.go.id) bahwa 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2022 adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

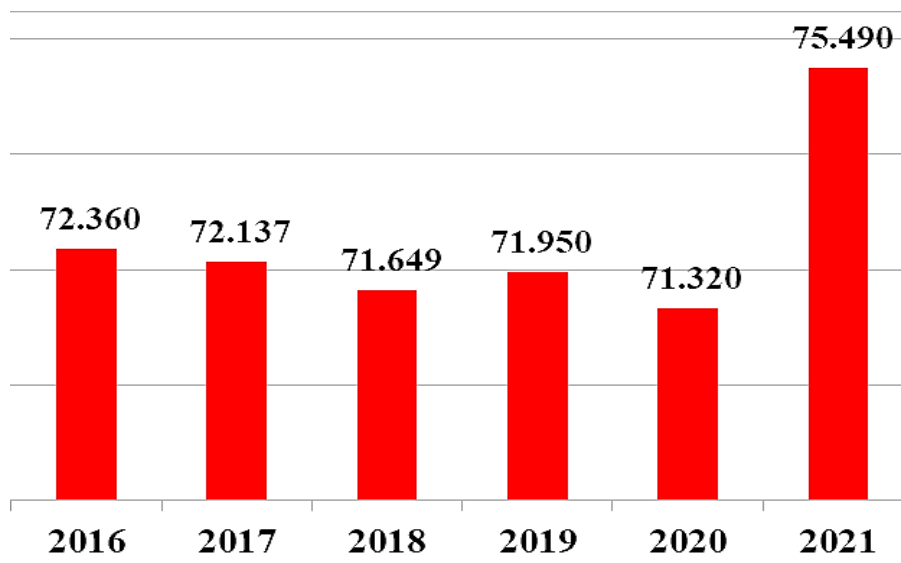
Apabila mengacu terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kemiskinan merupakan masalah sosial terutama untuk Indonesia sebagai negara berkembang yang terus menjadi beban untuk ditanggulangi. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang mencukupi kriteria standar kehidupan minimal berdasarkan kelayakan yang menjadi acuan (Serena, 2022). Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, provinsi NTB merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yakni sebesar 13.68 persen atau menempati urutan kedelapan penduduk miskin terbanyak di Indonesia ([bps.go.id](http://bps.go.id)). Masalah kemiskinan menjadi tantangan berat bagi Provinsi NTB dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Jika mengacu pada salah satu tujuan dari di bentuknya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apa pun (Tanpa Kemiskinan), seharusnya kemiskinan di Provinsi NTB menjadi berkurang, akan tetapi sebaliknya angka kemiskinan di Provinsi NTB masih tergolong cukup tinggi

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota (ribu jiwa), 2019-2021 Provinsi NTB yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan angka kemiskinan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2021. Adapun dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB, lima kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi yakni Kabupaten Lombok Timur menduduki urutan pertama, di lanjutkan oleh Kabupaten Lombok Tengah yang menduduki urutan kedua, kemudian Kabupaten Lombok Barat dengan urutan ketiga, lalu Kabupaten Bima dengan urutan keempat, dan yang terakhir Kabupaten Sumbawa dengan urutan kelima. Walaupun Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB yakni sebanyak 190.84 jiwa pada tahun 2021. Akan tetapi, pada penelitian ini penulis memilih studi kasus di Kabupaten Bima dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 75.490 jiwa pada tahun 2021 yang menduduki urutan keempat dengan jumlah

penduduk miskin tertinggi di kabupaten/kota Provinsi NTB dan menduduki urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi Sepulau Sumbawa. Selain itu, Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah di Provinsi NTB dengan jumlah penduduk terbanyak yang di mana menempati urutan ke lima setelah Kota Mataram (ntb.bps.go.id). Adapun bagan jumlah penduduk (Jiwa) Kabupaten Bima tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Di Kabupaten Bima

Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima mengalami naik turun dari tahun ke tahunnya dan di tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bima naik mencapai 75.490 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk dapat berdampak pada terus bertambah pula ketimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Oleh karena itu, dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bima Tahun 2021-2026, kemiskinan menjadi salah satu dari 12 isu strategis yang menjadi prioritas penanganan selama kurun waktu 2021-2026 oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Menindaklanjuti adanya masalah kemiskinan ini, maka pemerintahan daerah Kabupaten Bima telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2022 di bentuk melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 dengan SK dari pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima yakni Surat Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/370/07.1 Tahun 2022. Adapun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bima diketuai oleh Wakil Bupati Bima. Dalam melaksanakan kegiatannya TKPKD Kabupaten Bima memiliki Tim Sekretariat yang di ketuai oleh Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bima dan Tim Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan terkait TKPKD.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 53 Tahun 2020 menyelenggarakan fungsi dengan melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Rencana Aksi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bima Tahun Anggran 2022 dengan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Bima terdiri dari 4 (Empat) kelompok program yakni: *Pertama*, Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga (bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin). Dalam program yang pertama ini terdiri dari program pengembangan perumahan dan permukiman, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (KUBE), pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan pembangunan perikanan tangkap.

*Kedua*, Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat). Terkait dengan program ini terdiri dari program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, promosi pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat, penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, upaya kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan, dan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

*Ketiga*, Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro & Kecil (Bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil). Program ini terdiri dari program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), pengembangan destinasi pariwisata, dan program bidang ekonomi kreatif. *Dan terakhir*, Program-program lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdiri dari program pengembangan infrastruktur pedesaan dan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Kemudian, dalam rangka melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, maka Kabupaten Bima melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).

Walaupun Kabupaten Bima telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), akan tetapi pada kenyataannya angka kemiskinan di Kabupaten Bima masih tergolong di angka yang cukup tinggi yang di mana seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Bima menempati urutan keempat dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, angka kemiskinan di Kabupaten Bima mengalami peningkatan di tahun 2019 di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan. Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten

Bima mengalami peningkatan di tahun 2019, akan tetapi di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dan kembali naik di tahun 2021 (BPS, 2021). Masalah kemiskinan yang tidak pernah berakhir yang di mana kadangkala naik turun inilah yang menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Bima dalam mencapai salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yakni tanpa kemiskinan. Walaupun Kabupaten Bima telah membentuk TKPKD, akan tetapi belum mampu mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Kabupaten Bima masih menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi NTB. Oleh karena itu, melihat keadaan ini penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Efektivitas Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dalam Memperkuat SDGs Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Bima”** dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan mempelajari bagaimana efektivitas kelembagaan dari TKPKD Kabupaten Bima dalam memperkuat SDGs dengan tujuan mengurangi masalah kemiskinan yang tidak kunjung usai melainkan terus bertambah di daerah tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperkuat SDGs untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperkuat SDGs untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tidak hanya bagi penulis saja, akan tetapi juga bagi pembaca yang membaca hasil penelitian terkait dengan efektivitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperkuat SDGs untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima. Selain itu, penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan informasi dan dapat

menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bima terkait langkah tepat yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Bima terkait dengan kelembagaan TKPKD yang telah dibentuk dengan tujuan dapat mengurangi masalah kemiskinan di wilayah tersebut.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memerlukan adanya dasar untuk dijadikan sebuah acuan baik berupa teori-teori atau temuan yang dilakukan oleh para penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk lebih mudah dalam mengerjakan penelitiannya karena dapat menjadi patokan untuk dibandingkan pada hasil selanjutnya. Penelitian terdahulu menjadi sangat penting digunakan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dari berbagai jenis hasil karya ilmiah yang telah penulis temukan yang relevan dengan yang ingin penulis teliti, terdapat 10 karya ilmiah yang relevan dan memiliki beberapa perbedaan maupun persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Menurut Gunantoro (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan” menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM-MP yang dilakukan di Kelurahan Sragen Wetan dan Desa Karangudi berjalan cukup efektif walaupun terkait dengan penurunan angka kemiskinan masih lambat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Saputra (2018) dalam penelitiannya menjelaskan pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading secara

umum sudah efektif yang dilihat dari ketercapaian tujuan program, peningkatan pendapatan, dan mampu mengatasi masalah peningkatan keberfungsian sosial anggota, akan tetapi ada program yang belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yaitu mengenai keberlangsungan program terutama dalam penambahan modal usaha.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Kesuma & Fanida, 2019) menyatakan bahwa di Kabupaten Trenggalek telah terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), akan tetapi pemerintah daerah setempat melalui tim tersebut harus berusaha dengan keras dalam memaksimalkan kekuatan yang dimiliki seperti halnya struktur kelembagaannya dan memperluas peluang yang ada dengan menjadikan program GERTAK sebagai program pencontohan baik nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan seperti kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, maupun belum dilakukannya monitoring oleh TKPKD wilayah setempat. Lalu, Lestari et al., (2019) memfokuskan penelitiannya pada teamwork pengembangan kemitraan dengan studi kasusnya pada kelompok kerja pengembangan kemitraan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor, yang di mana dalam penelitian ini di peroleh bahwa kelima elemen teamwork saling berhubungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan yang merupakan organisasi pelayanan manusia dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Bogor.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurhizat (2020) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone kepada TKPKD Dinas Sosial daerah tersebut melalui pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui beberapa hal yakni dengan melakukan pelatihan kerja berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana yakni terkait dengan belum adanya bagan struktur TKPKD yang jelas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Rakhmawati (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa lingkungan kerja dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, lingkungan kerja dan kompetensi pegawai serta komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota TKPK. lingkungan kerja dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap anggota TKPK melalui komitmen organisasi sebagai variable intervening.



Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Silvia & Sujianto, (2021) menjelaskan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang efektif dan belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih ditemukan faktor penghambat yaitu konflik antar anggota yang menyebabkan kepengurusan KUBE tidak berfungsi dengan baik, kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan persaingan yang tidak sehat. Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfisyahrin (2021) menjelaskan bahwa dari dikresi pelaksanaan implementasi kenijakan terkait kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang menunjukkan bahwa TKPKD Kota Semarang merupakan tim bentukan pemerintah yang bertanggung jawab pada masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan mulai dari verifikasi database warga miskin, penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program penanggulangan. Oleh karena itu, TKPKD harus berusaha seoptimal mungkin dalam penyusunan program serta pemantauan pelaksanaan program di masing-masing dinas maupun badan pemerintah supaya penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Kemudian, Samsul et al., (2022) dalam penelitiannya terkait dengan TKPKD Dan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan dengan Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa akibat dari disfungsi TKPKD menyebabkan kasus kemiskinan yang dialami masyarakat pedesaan menjadi sangat memprihatinkan. Melihat keadaan masyarakat pedesaan tersebut, maka didesainlah sebuah model kelembagaan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengaktifkan Lembaga TKPKD supaya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan masyarakat pedesaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Mashur (2022) menjelaskan bahwa terkait strategi pengembangan usaha yang di bawa oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat dari strategi tersebut yakni komitmen dari TKPKD dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan koordinasi antar stakeholder yang kurang baik yang pada akhirnya berdampak pada tidak berjalan dengan baiknya strategi pengembangan usaha yang di usung. Adapun table terkait penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Edy Sudrajad Gunantoro (2017)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM-MP yang dilakukan di Kelurahan Sragen Wetan dan Desa Karangudi berjalan cukup efektif walaupun terkait dengan penurunan angka kemiskinan masih lambat.
2.	Romi Saputra (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Tanjunggading Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung Provinsi Lampung)	Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Tanjunggading secara umum sudah efektif yang dilihat dari ketercapaian tujuan program, peningkatan pendapatan, dan mampu mengatasi masalah peningkatan keberfungsian sosial anggota, akan tetapi ada program yang belum dapat tercapai sesuai dengan tujuan yaitu mengenai keberlangsungan program terutama dalam penambahan modal usaha.
3.	Wahyu Dewi Kesuma & Eva Hany Fanida (2019)	Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Trenggalek, akan tetapi pemerintah daerah setempat melalui tim tersebut harus berusaha dengan keras dalam memaksimalkan kekuatan yang dimiliki seperti halnya struktur kelembagaannya dan memperluas peluang yang ada dengan menjadikan program GERTAK sebagai program pentontonan baik nasional maupun

			internasional. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan seperti kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, maupun belum dilakukannya monitoring oleh TKPKD wilayah setempat.
4.	Rizki Bunga Lestari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan (2019)	Teamwork Pengembangan Kemitraan (Studi Kasus Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor)	Dari kelima elemen teamwork tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan yang merupakan organisasi pelayanan manusia dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Bogor.
5.	Umi Nurhizat (2020)	Pengembangan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Dinas Sosial Kabupaten Bone	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone kepada TKPKD Dinas Sosial daerah tersebut melalui pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui beberapa hal yakni dengan melakukan pelatihan kerja berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana yakni terkait dengan belum adanya bagan struktur TKPKD yang jelas.
6.	Paramitha Rakhmawati (2021)	Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Bappeda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, lingkungan kerja dan kompetensi pegawai serta komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota TKPK. lingkungan kerja dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap anggota TKPK melalui komitmen organisasi sebagai variable intervening.

		Kabupaten Bondowoso)	
7.	Silvia dan Sujianto (2021)	Efektivitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Dalam penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang efektif dan belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih ditemukan faktor penghambat yaitu konflik antar anggota yang menyebabkan kepengurusan KUBE tidak berfungsi dengan baik, kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan persaingan yang tidak sehat
8.	Doni Alfisyahrin (2021)	Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang	Dikresi pelaksanaan implementasi kenijakan terkait kemiskinan yang terjadi di Kota Semarang menunjukkan bahwa TKPKD Kota Semarang merupakan tim bentukan pemerintah yang bertanggung jawab pada masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan mulai dari verifikasi database warga miskin, penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program penanggulangan. Oleh karen itu, TKPKD harus berusaha seoptimal mungkin dalam penyusunan program serta pemantauan pelaksanaan program di masing-masing dinas maupun badan pemerintah supaya penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
9.	Samsul, Peribadi, Muhammad Arsyad, Tanzil, & Juhaepa (2022)	TKPKD Dan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Kabupaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKPKD Dan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan dengan Studi Kasus di Wilayah Pedesaan Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa akibat dari disfungsialisasi TKPKD menyebabkan kasus kemiskinan

		Konawe Selatan)	yang dialami masyarakat perdesaan menjadi sangat memprihatinkan. Melihat keadaan masyarakat perdesaan tersebut, maka didesainlah sebuah model kelembagaan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengaktifkan Lembaga TKPKD supaya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan masyarakat perdesaan.
10.	Fadel M. Azhari & Dadang Mashur (2022)	Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Pekanbaru	Hasil penelitian yang di peroleh yakni terkait dengan strategi pengembangan usaha yang di bawa oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat dari strategi tersebut yakni komitmen dari TKPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan koordinasi antar stakeholder yang kurang baik yang pada akhirnya berdampak pada tidak berjalan dengan baiknya strategi pengembangan usaha yang di usung.

Berdasarkan hasil analisis dari 10 penelitian terdahulu diatas, maka di temukan persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis teliti. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin penulis lakukan terletak pada metode penelitian yang di gunakan, yang di mana sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa perbedaan yang di temukan yakni terkait dengan studi kasus ataupun fokus penelitian yang dipilih oleh penulis, teori yang digunakan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya, maka ditemukan bahwa penelitian terdahulu hanya terbatas pada bagaimana efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan maupun efektivitas KUBE dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Selain itu, terkait dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitiannya pada cara

mengoptimalkan fungsi dari TKPKD ataupun pengembangan kapasitas dari TKPKD, serta strategi yang dilakukan TKPKD dalam mengurangi kemiskinan khususnya terkait dengan pengembangan ekonomi pada masyarakat, akan tetapi belum terdapat peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan efektivitas kelembagaan TKPKD. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada efektivitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperkuat SDGs untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Efektivitas Organisasi**

#### **1.6.1.1 Pengertian Efektivitas Organisasi**

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada jumlah prestasi masing-masing (Yuningsih, 2017). Efektivitas organisasi di definisikan sebagai tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu anggota-anggotanya (Georgepoulos dan Tannenbaum (1969:82) dalam (Erdina & Hariani, 2017)). Selain itu, Rahmawati & Laily (2018) juga menjelaskan terkait definisi dari efektivitas organisasi adalah tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan dari suatu organisasi dalam menjalankan fungsi- fungsi atau strategi-strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Seluruh organisasi harus dapat menentukan seberapa efektif mereka telah menggunakan sumber-sumber yang di miliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas organisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau memahami masalah kompleks yang terjadi dalam sebuah organisasi.

Pendapat lain terkait definisi dari efektivitas organisasi di jelaskan oleh Pangestuti & Maesaroh, (2018) yang di mana maksud dari efektivitas organisasi adalah suatu pengertian tujuan dan pencapaian dari tujuan

tersebut. Dalam hal ini maksudnya adalah suatu individu dianggap turut serta mengikuti atau bergabung dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang telah di targetkan sebelumnya secara lebih baik. *Organizational effectiveness* (Efektivitas Organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas organisasi diukur melalui kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang benar sebagai kunci keberhasilan organisasi (Febrian & Ristiliana, 2018). Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi dari efektivitas organisasi di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa efektivitas organisasi adalah tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka memperoleh hasil yang baik.

#### **1.6.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi**

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi salah satunya yakni menurut Parinsa dan Garnida (2013) dalam Pangestuti & Maesaroh (2018) yang menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Karakteristik Organisasi, yakni hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan SDM yang terdapat dalam sebuah organisasi.
- 2) Karakteristik Lingkungan, yang dalam hal ini mencakup aspek *ektern* yaitu lingkungan yang terdapat diluar batas organisasi dan memberikan pengaruh besar terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan mengambil sebuah tindakan.
- 3) Karakteristik Pekerja, yakni faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas karena setiap individu memiliki banyak perbedaan, akan tetapi kesadarn individu akan perbedaan tersebut sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen, yakni dalam hal ini seorang manajer merupakan pemegang peran yang besar dalam menentukan sebuah kebijakan, prosedur, maupun tindakan-tindakan

yang mempengaruhi kesanggupan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Selain itu, Menurut Robbins dan Timmothy (2011) dalam (Enadarlita & Asvio, 2019) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Adapun tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konteks, yakni dalam faktor ini mencakup sumber daya, kepemimpinan, struktur, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja dan sistem penghargaan.
- 2) Komposisi (*Composition*), yakni dalam faktor ini mencakup unsur-unsur kemampuan anggota, alokasi peran, fleksibilitas, besaran tim, serta preferensi dari anggota.
- 3) Proses, yakni dalam faktor ini mencakup efikasi tim, tingkat konflik, *social loafing*, maksud bersama dan tujuan spesifik.

#### **1.6.1.3 Indikator-Indikator Efektivitas Organisasi**

Menurut Manulang dalam (Enadarlita & Asvio, 2019), Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan akumulasi dari efektifitas perorangan. Dengan kata lain apabila setiap komponen organisasi melakukan tugas masing-masing dengan baik, maka efektivitas organisasi akan timbul. Organisasi yang efektif adalah yang menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan program kegiatan. Oleh karena itu, di perlukannya beberapa indicator atau tolak ukur yang dapat di gunakan dalam mengukur sejauh mana organisasi tersebut telah melaksanakan tujuannya dengan baik. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait indikator-indikator efektivitas organisasi seperti halnya Emitai Etziomi dalam (Yuningsih, 2017) yang mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi mencakup empat kriteria yakni adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi.

Selain itu, terdapat juga para ahli yang berpendapat terkait dengan indikator dari efektivitas organisasi seperti halnya dari Gibson dalam (Febrian & Ristiliana, 2018) yang mengatakan bahwa terdapat tujuh indikator dalam mengukur efektivitas organisasi antara lain : *Pertama*, kejelasan tujuan yang hendak dicapai. *Kedua*, kejelasan strategis pencapaian tujuan. *Ketiga*, proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang. *Keempat*, perencanaan yang matang. *Kelima*, penyusunan



program yang tepat. *Keenam*, tersedianya sarana dan prasarana. *Dan terakhir*, sistem pengendalian yang bersifat mendidik sementara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, pengukuran efektivitas organisasi menggunakan indikator atau tolak ukuran menurut Denison dan Mirsha (1995) dalam (Hardaningtyas & Suprobowati, 2020) yang mengatakan bahwa terdapat 4 indikator dalam mengukur efektivitas organisasi antara lain sebagai berikut :

1) Keterlibatan (*Involvement*)

Keterlibatan (*Involvement*) merupakan suatu perbuatan yang membuat staf merasa diikut sertakan pada setiap kegiatan organisasi sehingga dapat membuat staf bertanggung jawab pada setiap tindakan yang mereka lakukan. Keterlibatan merupakan suatu kebebasan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengemukakan ide atau gagasan mereka. Keterlibatan terdiri dari 3 indikator yakni sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan (*Empowerment*), yakni individu atau staf memiliki otoritas, inisiatif, ataupun kemampuan dalam mengelola pekerjaannya. Hal tersebut dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasi.
- b) Kerja Tim (*Team Orientation*), yakni bekerja dengan kooperatif dalam mencapai tujuan bersama yang di mana dalam hal ini semua karyawan atau staf merasa sama-sama bertanggung jawab antara satu dengan lainnya.
- c) Kemampuan Berkembang (*Capability Development*), yakni kemampuan pada suatu organisasi supaya dapat meningkatkan kemampuan pada setiap individu (staf) sehingga pada akhirnya mampu berkompetisi serta mencapai tujuan organisasi.

2) Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi merupakan kemampuan dalam suatu organisasi untuk bisa mengartikan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Adaptasi juga di artikan sebagai kemampuan dari suatu organisasi dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dengan cara melakukan perubahan internal pada suatu organisasi. Kemampuan adaptasi terdiri dari 3 indikator yakni sebagai berikut:

- a) Perubahan (*Creating Change*), yakni suatu organisasi mampu menciptakan sebuah pembaharuan serta mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung.
- b) Berfokus Pelanggan (*Customer Focus*), yakni suatu organisasi mampu memberikan kepuasan terhadap para pelanggan.
- c) Keadaan Organisasi (*Organizational Learning*), yakni suatu proses yang mampu mendukung sebuah organisasi supaya dapat beradaptasi dengan perubahan dan dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik.

### 3) Misi (*Mission*)

Misi yakni memberikan arah dan tujuan yang jelas yang dapat menentukan tindakan yang tepat yang dapat di terapkan pada sebuah organisasi maupun terhadap anggotanya. Organisasi yang dapat mencapai kesuksesan adalah organisasi yang memiliki arah dan tujuan yang jelas yang di mana dapat di lihat di masa yang akan datang. Misi memiliki 3 indikator yakni sebagai berikut:

- a) Strategi Yang Terarah Dan Juga Tepat (*Strategic Direction and Intent*), yakni arahan startegi yang jelas menentukan tujuan organisasi dan memperjelas bagaimana setiap orang dapat berkontribusi pada organisasi.
- b) Tujuan Dan Objektivitas (*Goals and Objectivity*), yakni tujuan yang jelas yang berkaitan dengan misi, visi, maupun strategi yang dapat memberikan arahan yang jelas pada setiap orang dalam organisasi ketika bekerja.
- c) Visi (*Vision*), yakni organisasi memiliki sudut pandang bersama terkait dengan masa depan yang di inginkan dalam suatu organisasi.

### 4) Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah suatu kesepakatan dari setiap anggota yang terdapat dalam sebuah organisasi terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai organisasi. Konsistensi dalam hal ini yakni menekankan pada sistem keyakinan-keyakinan, symbol, maupun nilai yang di anutt bersama oleh seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Konsistensi dalam organisasi

merupakan dimensi yang menjaga kekuatan serta stabilitas dalam organisasi. Konsistensi memiliki 3 indikator yakni sebagai berikut:

- a) Nilai Inti (*Core Value*), yakni pedoman terkait dengan sesuatu yang tepat atau tidak yang mengarah pada tindakan maupun perilaku staf dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi.
- b) Kesepakatan (*Agreement*), yakni proses ketika staf dalam suatu organisasi dapat mencapai kesamaan pendapat tentang suatu masalah yang terjadi.
- c) Koordinasi Dan Integrasi (*Coordination and Integration*), yakni berbagai fungsi serta unit yang ada pada organisasi yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan dalam suatu organisasi tanpa harus menunggu hak masing-masing.

## **1.6.2 Kemiskinan**

### **1.6.2.1 Pengertian Kemiskinan**

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari dasar kata miskin yang memiliki arti tidak berharta-benda. Adapun secara umum, kemiskinan merupakan kondisi kurangnya tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhi standar kualitas hidupnya. Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi dalam rangka memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan maupun papan. Apabila masyarakat memiliki pendapatan yang rendah akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan maupun standar pendidikan. Secara luas, kemiskinan di artikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh masyarakat, keluarga, komunitas, maupun sebuah negara yang menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, posisi tawar dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Mantovani, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik (Ardyansah et al., 2018). PBB mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (Mantovani, 2021).

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi (Dueramae, 2017). Rimawan & Aryani (2019) juga mendefinisikan kemiskinan sebagai masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan kurang berkembang, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan mereka untuk bekerja dan memiliki akses terbatas ke kegiatan ekonomi sehingga mereka tertinggal oleh masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Berdasarkan beberapa definisi dari kemiskinan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan yang di alami oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik itu kebutuhan pangan, sandang, maupun papan.

#### **1.6.2.2 Bentuk-Bentuk Kemiskinan**

Dalam (Gani et al., 2021) menjelaskan bahwa kemiskinan di bagi menjadi empat bentuk yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan bentuk yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Adapun penjelasan dari keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut merupakan pendapatan suatu seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pangan, sandang, kesehatan perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dijelaskan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena sikap dan kebiasaan pribadi atau sosial.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya, biasanya terjadi dalam budaya sosial atau tatanan sosial politik yang tidak mendukung emansipasi dari kemiskinan.

### **1.6.2.3 Jenis-Jenis Kemiskinan**

Sajogyo dalam (Kurniawati, 2017) mendefinisikan bahwa kemiskinan di bagi menjadi tiga jenis. Adapun tiga jenis dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi di sebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya kedua faktor tersebut mengakibatkan tingkat produksi juga menjadi rendah.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural terjadi di sebabkan oleh tidak adanya kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari

sistem budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat pada diri mereka sehingga sulit untuk di ubah kembali.

### 3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

#### **1.6.2.4 Penyebab Kemiskinan**

Secara umum kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi yakni kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam yang sering terjadi. Adapun kemiskinan buatan dapat terjadi karena lembaga- lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga masyarakat tetap dalam keadaan miskin. Mantovani (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sebab terjadinya kemiskinan antara lain sebagai berikut :

- a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan dengan kualitas yang rendah.
- b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah di tambah dengan produktivitas rendah, yang pada akhirnya upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c) Kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Selain itu, *World Bank* dalam (Kurniawati, 2017) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab utama dari adanya kemiskinan. Adapun tiga penyebab utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
- b) Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.

- c) Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Selanjutnya, Cox (2004) dalam (Putri, 2021) juga menyebutkan bahwa terdapat empat dimensi penyebab kemiskinan bersifat kompleks. Adapun empat dimensi penyebab kemiskinan bersifat kompleks adalah sebagai berikut:

- a) Kemiskinan yang dilakukan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara maju, sedangkan negara-negara berkembang terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Hal ini dikarenakan negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
- b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan.
- c) Kemiskinan sosial, seperti halnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial.
- d) Kemiskinan konsekuensi. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

#### **1.6.2.5 Dampak Adanya Kemiskinan**

Setelah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang merupakan suatu permasalahan sosial, maka yang sangat perlu untuk diketahui juga yakni dampak yang akan muncul ketika masalah sosial atau kemiskinan ini terjadi. Munculnya masalah kemiskinan dapat memberikan dampak sosial yang sangat beragam seperti halnya adanya tindakan kriminal, kesehatan terganggu, pengangguran, dan sebagainya. Sebagian besar tindakan kriminal yang marak terjadi pada masyarakat disebabkan oleh motif ekonomi yang di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Adapun beberapa dampak dari adanya kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Banyak anak yang tidak bisa menikmati pendidikan yang berkualitas yang di mana hal tersebut di sebabkan oleh tingginya biaya pendidikan sehingga masyarakat tidak mampu untuk menjangkau nya.
2. Susahnya mencari pekerjaan yang pada akhirnya mengakibatkan masyarakat banyak yang pengangguran.
3. Sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang di mana hal ini di sebabkan oleh biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat.

Mantovani (2021) menjelaskan bahwa dari dampak-dampak yang telah disebutkan secara umum sebelumnya, dapat di generalisir dalam lima aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Kependudukan

Apabila dilihat dari segi kependudukan, kemiskinan berdampak pada ketidak merataan pertumbuhan penduduk di setiap wilayah sehingga ketidak merataan tersebut membawa konsekuensi berat kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

2. Aspek Ekonomi

Masalah Ekonomi menyangkut masalah rumah tangga penduduk dalam memenuhi kebutuhan materi nya. Masalah ini terbagi ke dalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi.

3. Aspek Lingkungan

Dampak yang timbul dari segi aspek lingkungan dapat berupa keterbelakangan pembangunan, kebodohan, banjir, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung di lingkungan masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin.

4. Aspek Pendidikan

Dampak kemiskinan terhadap pendidikan sangat merugikan bagi masyarakat karena pendidikan adalah aspek penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pemberontakan



Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar- etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya.

#### **1.6.2.6 Indikator Kemiskinan**

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Harniati, 2010 dalam (Putri, 2021)). Adapun indikator kemiskinan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang di konsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- 2) Akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahal nya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- 3) Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal nya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan,rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- 4) Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
- 5) Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.

- 6) Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
- 7) Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan strategi untuk penguasaan tanah.
- 8) Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.

### **1.6.3 Sustainable Development Goals (SDGs)**

#### **1.6.3.1 Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pada tahun 2012, konsep dan istilah SDGs muncul pertama kali ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi terkait dengan Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Dari konferensi tersebut, tujuan dan harapan ingin dicapai secara bersama bersifat universal yang di mana dapat menjaga keseimbangan dari perekonomian, sosial dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan (Serena, 2022). SDGs diresmikan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan program sebelumnya yakni *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai dengan tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara. Kurang lebih 193 kepala negara hadir dalam konferensi tersebut, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. SDGs menjadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MDGs sekarang diganti dengan SDGs (Rusni, 2021). Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya (Musri, 2020).

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* didefinisikan sebagai "*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh komisi dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan *the World Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987 (Sarifudin, 2021). Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* adalah proses perubahan yang telah di rencanakan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang semuanya dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan dengan tetap menitikberatkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial dan kelanjutan perekonomian (Rusni, 2021).

#### **1.6.3.2 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, yang di mana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global dan dapat diterapkan secara universal. Adapun 17 tujuan SDGs secara global dalam (Musri, 2020) yakni *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan), *Good Health And Well-Being* (Kesehatan Yang Baik Dan Kesejahteraan), *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas), *Gender Quality* (Kesehatan Gender), *Clean Water And Sanitation* (Air Bersih Dan Sanitasi), *Affordable And Clean Energy* (Energi Bersih Dan Terjangkau), *Decent Work And Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi Dan Pekerjaan Yang Layak), *Industry, Innovation And Infrastructure* (Industri, Inovasi, Dan Infrastruktur), *Reduced Inequalities* (Mengurangi Kesenjangan), *Sustainable Cities And Communities* (Keberlanjutan Kota Dan Komunitas), *Responsible Consumption And Production* (Konsumsi Dan Produksi Bertanggung Jawab), *Climate Action* (Aksi Terhadap Iklim), *Life Below Water* (Aksi

Terhadap Iklim), *Life On Land* (Kehidupan Di Darat), *Peace, Justice, And Strong Institutions* (Institusi Peradilan Yang Kuat Dan Kedamaian), dan yang terakhir adalah *Partnerships For The Goals* (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan). Dari tujuh belas tujuan SDGs yang telah disebutkan diatas, salah satu tujuan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan besar yakni terkait dengan tujuan yang pertama tanpa kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih tergolong cukup tinggi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah terkait bagaimana cara mengakhiri nya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya terkait tujuan yang pertama tentang kemiskinan.

### **1.6.3.3 Target-Target SDGs Dalam Mengurangi Kemiskinan**

Tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* yakni terkait dengan tujuan tanpa kemiskinan (*no poverty*) yaitu mengakhiri kemiskinan di mana pun dan dalam bentuk apa pun. Adapun target-target yang memuat tujuan tanpa kemiskinan tersebut yang di jelaskan (Pangestu, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau sekitar Rp. 7.800, per hari.
2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin berdasarkan definisi nasional.
3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat.
4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak yang setara dan dapat mengakses sumber ekonomi.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial dan bencana.

## **1.6.4 Pemerintah Daerah**

### **1.6.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No. 9 Tahun 2015)

menandai suatu babak baru dalam kebijakan otonomi dan relasi Pusat-Daerah saat ini. Penataan ulang urusan mapun penguatan kedudukan Gubernur dan pemerintahan Propinsi, hingga pengenalan konsep manajemen tranisasi berupa status daerah persiapan dalam pemekaran wilayah hanyalah sebagian contoh yang bisa disitir sebagai butki perubahan. Pastinya dalam pola dan warna relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, berbagai perubahan yang ada sedikit banyak membawa dinamika baru dalam pengelolaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan (Munawaroh, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)). Selain itu, Pemerintah Daerah di definisikan sebagai penanggung jawab atau pun pelaksana bagi semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan di suatu daerah otonom. Dalam hal ini, pemerintah daerah menjadi peran utama dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan sebaigai mungkin kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Nuraeni, 2016).

#### **1.6.4.2 Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id)).

#### **1.6.4.3 Peran Pemerintah Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Peran pemerintah daerah dimaksudkan melaksanakan

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Suprianto, 2018).

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Adapun pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaann Otonomi Daerah (Nuraeni, 2016).

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Efektivitas Organisasi**

Efektivitas Organisasi merupakan tolak ukur yang di gunakan dalam mengetahui berhasil atau tidak dengan dibentuknya sebuah tim atau organisasi dalam hal ini terkait dengan tim TKPKD yang dibentuk dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota berdasarkan target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

### 1.7.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kehidupannya sehari-hari baik itu terkait dengan kebutuhan sandang, papan, maupun kebutuhan pangan.

### 1.7.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu proses perubahan yang memang dengan sengaja di rencanakan terlebih dahulu yang di mana di dalam nya menyangkut tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yakni tanpa kemiskinan, kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesehatan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, dan sebagainya.

### 1.7.4 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan suatu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang di mana pemerintah daerah dan DPRD berdasar kan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan bagaimana kelembagaan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperkuat SDGs untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Keterlibatan ( <i>Involvement</i> )	Pemberdayaan ( <i>Empowerment</i> )	– Kemampuan dalam mengelola pekerjaan mulai dari penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan



		kemiskinan.
	Kerja Tim ( <i>Team Orientation</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu bekerja dengan kooperatif</li> <li>- Memiliki rasa tanggung jawab bersama antara satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.</li> </ul>
	Kemampuan Berkembang ( <i>Capability Development</i> )	Kemampuan pada setiap individu (Staf) dalam mencapai tujuan.
Adaptasi ( <i>Adaptation</i> )	Perubahan ( <i>Creating Change</i> )	Pembaharuan yang di ciptakan dalam mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung
	Berfokus Pelanggan ( <i>Customer Focus</i> )	<p>Mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat</p> <p>Bentuk kepuasan yang diberikan kepada masyarakat</p>
	Keadaan Organisasi ( <i>Organizational Learning</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses yang mendukung suatu organisasi supaya mampu beradaptasi dengan perubahan seperti halnya fasilitas yang disediakan.</li> </ul>
Misi ( <i>Mission</i> )	Strategi Yang Terarah Dan Juga Tepat ( <i>Strategic Direction and Intent</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan dalam menentukan strategi yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim TKPKD.</li> </ul>
	Tujuan Dan Objektivitas ( <i>Goals and Objectivity</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menentukan tujuan yang jelas yang dapat memberikan arahan.</li> </ul>

	Visi ( <i>Vision</i> )	– Pandangan yang ingin di capai untuk masa depan.
Konsistensi ( <i>Consistency</i> )	Nilai Inti ( <i>Core Value</i> )	– Tindakan atau perilaku staf yang merupakan anggota tim TKPKD dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
	Kesepakatan ( <i>Agreement</i> )	– Kemampuan dalam mencapai kesamaan pendapat terkait dengan pengurangan kemiskinan.
	Koordinasi Dan Integrasi ( <i>Coordination and Integration</i> )	– Kemampuan dalam mengkoordinasikan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, hingga evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan.

## 1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus di lalui oleh peneliti yang terdiri dari langkah-langkah dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan kemudian di olah dan di analisis secara ilmiah. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yakni teknik analisis data.

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian atau pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena yang di alami oleh subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan efektivitas kelembagaan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memperkuat SDGs untuk mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Bima.

### 1.9.2 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kantor Bappeda Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan lokasi kantor tepatnya di JL Soekarno-Hatta-Raba, Paruga, Rasanae Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat.

### 1.9.3 Jenis Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis atau sumber data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

**1.9.3.1 Data Primer**, adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara terhadap seseorang yang dapat memberikan informasi atau informan yang telah di tentukan sebelumnya.

**1.9.3.2 Data Sekunder**, adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui dokumentasi, artikel, jurnal, buku, dan sebagainya yang dapat memberikan informasi terkait yang penulis teliti.

### 1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**1.9.4.1 Wawancara**, adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan atau pihak yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti guna mendapatkan data yang dapat mendukung analisis dalam penelitian.

Tabel 1.3 Daftar Informan

Instansi	Jumlah Informan	Jabatan Dalam Instansi
Tim TKPKD	1. H. Fahrudin, S.Sos, MAP 2. Syamsurizal, S.Sos 3. Deny Kusumayadi,	1. Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bima 2. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Bidang Sosial Budaya pada Dinas

	<p>S.Psi</p> <p>4. Muhammad Thohir, SE</p> <p>5. Mardin, S.Sos</p>	<p>PEMDES</p> <p>3. Fungsional Pekerja Sosial Muda Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial</p> <p>4. Kabid Dinas Koperasi dan UKM</p> <p>5. Kabid Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>
<p>Pemerintah Kecamatan</p>	<p>1. Dra. Darwis</p> <p>2. Muslim, S. Ag</p> <p>3. One Setiawan, S.H</p> <p>4. Samsudin, S.Sos</p>	<p>1. Camat Palibelo</p> <p>2. Sekretaris Camat</p> <p>3. Kasubag Program</p> <p>4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p>
<p>Pemerintah Desa</p>	<p>1. Ibrahim Abubakar, S.Pd</p> <p>2. Burhan</p> <p>3. Edy</p>	<p>1. Kepala Desa</p> <p>2. Sekretaris Desa</p> <p>3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa</p>
<p>Unsur masyarakat</p>	<p>1. Hasdiana</p> <p>2. Safiah</p> <p>3. Hasan</p> <p>4. Sudirman</p> <p>5. Marjan</p>	<p>1. Anggota BUMDES</p> <p>2. Penerima manfaat program air bersih</p> <p>3. Penerima manfaat program rumah layak huni</p> <p>4. Penerima manfaat program pembangan infrastruktur perdesaan dengan membangun tangki septik komunal.</p> <p>5. Penerima manfaat program air bersih</p>

**1.9.4.2 Dokumentasi**, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuka atau membaca kembali dokumen-dokumen atau pun catatan-catatan baik berupa buku, surat kabar, dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Setelah memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya yakni mengolah data yang telah terkumpul, kemudian menganalisis data tersebut. Pada tahapan ini data yang berhasil diperoleh yang kemudian akan dianalisis serta disusun secara sistematis sehingga dari data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menggambarkan hasil dari pada studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab permasalahan. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan suatu konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan objek dari penelitian (Mirawati, 2018). Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Putri, 2021) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Adapun penjelasan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

#### **1.9.5.1 Pengumpulan Data**

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap pihak-pihak sebagai sumber informasi dan hasil dokumentasi yang diperoleh melalui buku, dan sebagainya.

#### **1.9.5.2 Reduksi Data**

Adapun pada tahap reduksi data, kegiatan yang dilakukan yakni memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah didapatkan dipilih supaya tepat untuk menjawab rumusan masalah.

#### **1.9.5.3 Penyajian Data / *Display Data***

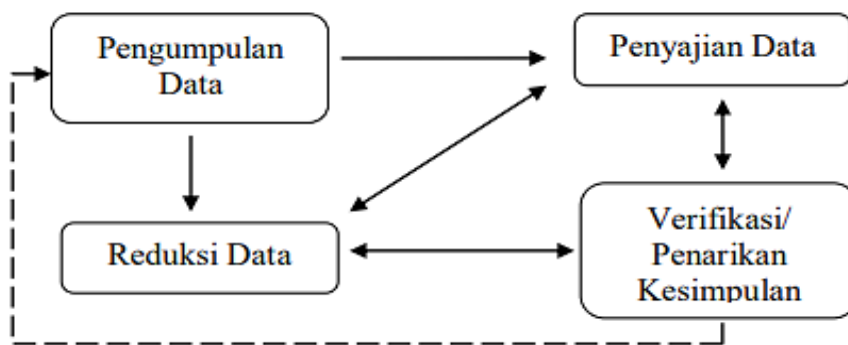
Data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi setelah melewati tahapan reduksi data, maka selanjutnya akan disajikan. Kegiatan

dilakukan pada tahap *display data* adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan.

#### 1.9.5.4 Menarik Kesimpulan

Setelah data di sajikan, maka langkah yang terakhir adalah proses penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah ketiga tahapan sebelumnya telah dilakukan (Putri, 2021)

Gambar 1.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman



Sumber: <http://nadyaputrinote.blogspot.com/2019/02/pt-1.html>